

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Produk Domestik Bruto**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu.<sup>30</sup> Dalam hal ini PDB berarti jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan PDB ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan.

PDB dipakai untuk pendapatan nasional yang merujuk pada pengertian nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut, sehingga definisi ini meliputi; (1) Produk dan jasa akhir, dalam pengertian barang dan jasa yang dihitung dalam PDB adalah barang dan jasa yang digunakan pemakai terakhir (untuk konsumsi), (2) Harga pasar, yang menunjukkan bahwa nilai output nasional tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari adanya peningkatan pada PDB yang dihasilkan. Adanya peningkatan dalam PDB

---

<sup>30</sup>Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*,...hlm.136.

<sup>31</sup>Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, .. hlm. 10.

berarti menunjukkan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Dimana pendapatan per kapita ini merupakan pendapatan masyarakat per individu. Penggunaan PDB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. PDB Indonesia merupakan nilai tambah yang dihitung berdasarkan seluruh aktivitas ekonomi tanpa membedakan pemiliknya apakah dilakukan oleh warga negara Indonesia atau dilakukan oleh warga negara asing, sejauh proses produksinya dilakukan di Indonesia.

Kinerja perekonomian sebuah negara dapat diukur untuk mengetahui apakah taraf hidup masyarakatnya meningkat, menurun atau tetap stabil. PDB dapat dihitung dengan dua harga yaitu; (1) PDB riil, merupakan nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga konstan. PDB riil menunjukkan apa yang terjadi terhadap pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga tidak, (2) PDB nominal, merupakan nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku.<sup>32</sup> PDB dapat dihitung menggunakan metode-metode berikut:

#### 1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit-unit ekonomi.

Dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan

---

<sup>32</sup>N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, diterjemahkan oleh : Wibi Hardani, (Jakarta:Erlangga, 2006), hlm.22.

adalah nilai tambah masing-masing sektor, dimana nilai tambah ini merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input.

## 2. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah gaji/upah, sewa, laba, dan bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam defisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).<sup>33</sup>

## 3. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian yaitu diantaranya :

### a. Konsumsi Rumah Tangga

Nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, membiayai jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang

---

<sup>33</sup>Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*,(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal. 16.

tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dan perbelanjaan tersebut dinamakan konsumsi. Kegiatan rumah tangga untuk membeli rumah digolongkan sebagai investasi.

b. Pengeluaran Pemerintah

Pembelian pemerintah dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis, dan kertas untuk digunakan serta membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah adalah pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi.

c. Pembentukan Modal Tetap Sektor Swasta (Investasi)

Pembentukan modal tetap sektor swasta atau yang lebih dinyatakan sebagai investasi pada hakikatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Membangun gedung perkantoran, mendirikan bangunan industri, membeli alat-alat produksi adalah beberapa bentuk pengeluaran yang tergolong sebagai investasi.

d. Ekspor Netto

Ekspor netto adalah nilai ekspor yang dilakukan suatu negara dalam satu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode

yang sama. Ekspor suatu negara, seluruh atau sebagian nilainya merupakan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri.<sup>34</sup>

Untuk menghitung PDB melalui pendekatan pengeluaran adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran di atas. Sehingga PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, dan ekspor netto (merupakan ekspor dikurangi impor). Secara sistematis, ditunjukkan dengan persamaan berikut ini :

$$GDP = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan :

C = pengeluaran konsumsi

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

## **B. Sertifikat Bank Indonesia Syariah**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008, Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.<sup>35</sup> Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang dulunya disebut

---

<sup>34</sup>Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, diterjemahkan oleh : Benyamin molan, (Jakarta : PT Indeks, 2004).hlm.27.

<sup>35</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah*, Bab 1 Pasal 1.hlm.3.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas Bank Syariah.<sup>36</sup> Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasamoneter yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>37</sup> Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008, SBIS diterbitkan dengan menggunakan akad *ju'alah*. Pada dasarnya, *ju'alah* adalah hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan. Ketentuan akad *ju'alah* dalam SBIS diantaranya adalah; (1) SBIS *ju'alah* sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah, (2) dalam SBIS *ju'alah*, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan), Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ulah* (penerima pekerjaan), sedangkan obyeknya (*mahall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jangka dan jumlah tertentu, (3) Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya

---

<sup>36</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grafindo Media Pratama, 2008).hlm.247.

<sup>37</sup>Nopirin, *Ekonomi Moneter*,.hlm.45.

pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Dalam SBIS *ju'alah* juga terdapat beberapa ketentuan hukum diantaranya adalah ; (1) Bank Indonesia wajib memberikan imbalan yang telah dijanjikan kepada bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu melalui pembelian SBIS *ju'alah*, (2) dana bank syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadi'ah amanah khusus* yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh bank syariah sebelum jatuh tempo, (3) dalam hal bank syariah sebagai penitip dana memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo maka dapat *me-repokan* SBIS *ju'alah* dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda dalam jumlah tertentu, (4) Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS *ju'alah* kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.

SBIS memiliki karakteristik diantaranya; (1) satuan unit sebesar satu juta rupiah, (2) berjangka waktu paling kurangsatu bulan dan paling lama dua belas bulan, jangka waktu SBIS dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung satu hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo, (3) diterbitkan tanpa warkat, (4) dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, SBIS dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dalam rangka

---

<sup>38</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah*.hlm.5.

*repurchase agreement (repo)* syariah, fasilitas likuiditas, fasilitas pembiayaan jangka pendek, atau fasilitas lainnya bagi BUS atau UUS,<sup>(5)</sup> tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana.<sup>39</sup>

Mekanisme penerbitan SBIS adalah diterbitkan melalui lelang. Dalam hal ini, mekanisme penerbitan SBIS melalui lelang telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM pada Tahun 2003, dan kemudian di revisi dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/66/INTERN Tahun 2008. Mekanisme penerbitan SBIS meliputi (1) BUS, UUS, Pialang atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran penyimpanan dana dalam SBIS ke Bank Indonesia (2) Bank Indonesia menetapkan hari lelang (*window time*) (3) Bank Indonesia melakukan penerbitan dengan mekanisme lelang kepada peserta lelang BUS, UUS atau Pialang Atas nama BUS/UUS (4) Dewan Gubernur 4 memutuskan Pemenang Lelang (5) bagian PTPM melakukan *approval* tingkat imbalan SBIS melalui Bank Indonesia (6) Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro nilai nominal SBIS + imbalan dalam rangka setelmen dana, Bank Indonesia mendebet Surat Berharga nilai nominal SBIS + imbalan dalam rangka setelmen Surat Berharga. Perhitungan imbalan SBIS berdasarkan rumus sebagai berikut: Nilai imbalan SBIS = nilai nominal SBIS x (jangka waktu SBIS/360) x tingkat imbalan SBIS.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010).hlm.127.

<sup>40</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah*, Bab 1 Pasal 1.hlm.5

### C. Surat Berharga Syariah Negara

Dalam memenuhi permintaan pasar terhadap produk syariah, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan sukuk dalam rangka pembiayaan pembangunan melalui APBN.<sup>41</sup> SBSN atau yang biasa disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah yang berlandaskan syariah islam sesuai dengan UU no.19 tahun 2008 tentang SBSN.<sup>42</sup> Pemerintah mengarahkan penerbitan SBSN digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa misalnya pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui penerbitan SBSN.<sup>43</sup> Peningkatan sumber pembiayaan terutama pembiayaan infrastruktur dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada suatu wilayah.

Dalam pengertian lain SBSN merupakan surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan / atau barang milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan / atau bangunan maupun selain tanah dan / atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan. Barang milik Negara adalah semua barang yang

---

<sup>41</sup>Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).hlm.125.

<sup>42</sup>Musdalifah Aziz, *Manajemen Investasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015).hlm.59.

<sup>43</sup> Eri Hariyanto, *Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat*,...hlm.10.

dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam rangka mendukung pengembangan pasar sukuk negara hingga saat ini pemerintah telah mengembangkan dan menerbitkan 6 jenis instrumen sukuk negara yang ditujukan pada target investor yang bervariasi baik di pasar keuangan domestik maupun internasional. Jenis instrumen sukuk negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S)

SPN-S adalah sukuk negara jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka mendukung pengelolaan kas pemerintah dan mendukung pengembangan pasar uang syariah domestik. SPN-S memiliki fitur antara lain bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. SPN-S yang diterbitkan adalah bertenor 6 bulan di mana penerbitan pertama kali dilakukan melalui lelang pada tahun 2011. Hingga saat ini, sukuk negara seri SPN-S diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.

2. *Project Based Sukuk (PBS)*

Sukuk negara seri PBS merupakan sukuk negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah-panjang dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri dengan tingkat imbalan

tetap yang dibayarkan setiap semester serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

### 3. Sukuk Negara Ritel (SR)

Dalam rangka memperluas basis investor ritel sekaligus mengoptimalkan pasar dalam negeri pemerintah menerbitkan seri sukuk negara khusus ditujukan bagi investor individu yaitu sukuk negara ritel. Sukuk negara ritel merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai sebagai bukti atas penyertaan aset SBSN yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual.

### 4. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara *private placement*. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009.<sup>44</sup>

### 5. Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk tabungan merupakan varian dari sukuk ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia (WNI). Sukuk tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah yaitu sebesar 2 juta rupiah.

---

<sup>44</sup>Tim penyusun, *Tanya Jawab tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, 2010).hlm.31.

## 6. Sukuk Negara Indonesia (SNI atau Sukuk Global)

Dalam rangka mengimplementasikan strategi pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan APBN dan untuk turut serta berpartisipasi dalam mengembangkan pasar keuangan syariah internasional pemerintah menerbitkan SNI (sukuk global). SNI diterbitkan dengan imbalan tetap serta dapat diperdagangkan.

Terdapat beberapa bentuk SBSN yaitu meliputi : (1) SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat yang kepemilikannya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah,(2)SBSN tanpa warkat atau *scripless* adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book- entry system*). Dalam hal SBSN tanpa warkat bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*, Bab 1Pasal 2.hlm.4.

Mekanisme jual beli atau transaksi SBSN dapat dilakukan dalam dua pasar yaitu pasar perdana dan pasar sekunder :

1. Pasar Perdana (*primary market*)

Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kalinya.<sup>46</sup> Di dalam pasar perdana ini, pihak emiten (dalam hal ini penerbit SBSN) akan melakukan penjualan SBSN yang diterbitkan. Penjualan SBSN di pasar perdana merupakan tahap awal dari perdagangan SBSN, karena tujuan penerbitan SBSN adalah untuk personal investor, maka tahap ini SBSN tersebut ditawarkan hanya kepada calon pembeli personal investor.

2. Pasar sekunder (*secondary market*)

Pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di pasar perdana baik di luar maupun di luar negeri. SBSN yang diperdagangkan di pasar sekunder ini adalah SBSN yang diperjualbelikan di pasar sekunder baik di luar maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan/atau di luar bursa yang biasa di sebut *over the counter* (OTC). Dalam hal ini terdapat SBSN yang tidak dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan yaitu meliputi; (1) SBSN yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SBSN sesuai

---

<sup>46</sup>Tim penyusun, *Tanya Jawab tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, ...*hlm.24.

dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya, dan (2) SBSN yang karena sifat akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.<sup>47</sup>

#### **D. Konsumsi Rumah Tangga**

Konsumsi rumah tangga merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan rumah tangga untuk membeli barang dan jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu.<sup>48</sup> Konsumsi tersebut merupakan pendapatan yang diterima rumah tangga kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya seperti pembelian makanan, pakaian, membayar pendidikan, dan lain-lain. Jadi konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, memuaskan keinginan untuk memiliki dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Sebuah transaksi yang dilakukan rumah tangga tidak semuanya disebut konsumsi, misalnya seseorang membeli mesin untuk perusahaan atau rumah hal tersebut dapat disebut investasi.

Konsumsi adalah pembelian barang dan jasa seperti rumah, makanan, tanah, dan pelayanan kesehatan oleh rumah tangga atau individu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ada empat faktor yang menentukan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu ; (1) Pendapatan , terdapat hubungan positif antara konsumsi dan pendapat, apabila pendapatan naik maka pengeluaran konsumsi akan naik, sebaliknya jika pendapatan turun maka pengeluaran konsumsi akan turun; (2) Prospek pendapatan, panen raya

---

<sup>47</sup>Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*, Bab 1Pasal 2.hlm.4.

<sup>48</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*..hlm.337.

yang sangat menjanjikan akan merangsang para petani untuk memperbesar konsumsi mereka saat ini, sebaliknya jika akan terjadi kegagalan panen petani akan mengurangi konsumsi mereka mulai dari saat ini; (3) Kekayaan, orang yang mempunyai aset kekayaan seperti tabungan, saham, atau obligasi tidak terlalu memperlumahkan pengeluaran konsumsi mereka dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kekayaan; dan (4) Suku bunga, Suku bunga yang rendah akan mendorong orang melakukan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi yang lebih mewah, sebaliknya suku bunga yang tinggi akan mengurangi pinjaman mereka.<sup>49</sup>

Berikut adalah macam-macam teori konsumsi :

#### 1. Teori Keynesian

Keynes mengasumsikan bahwa konsumsi rumah tangga (C) bergantung pada pendapatan<sup>50</sup>. Namun disamping itu Keynes juga mempercayai beberapa faktor seperti tingkat suku bunga dan kekayaan yang cenderung mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi. Keynes mengemukakan dua hal, yang pertama adalah beliau mengemukakan bahwa konsumsi adalah fungsi positif dari pendapatan.

Jadi, semakin banyak pendapatan, maka konsumsi juga semakin banyak. Selanjutnya yang kedua adalah Keynes mengemukakan bahwa rumah tangga yang berpendapatan tinggi mengkonsumsi yang lebih sedikit daripada yang berpendapatan rendah. Pendapatan yang dikeluarkan oleh rumah tangga konsumsi diukur oleh kecenderungan

---

<sup>49</sup>Tony Hartono.hlm.250

<sup>50</sup>Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro...*hlm.272

rata-rata untuk mengkonsumsi. Fungsi konsumsi menurut Keynes adalah sebagai berikut :  $C = a + bY$

Dimana :

$C$  = besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga

$a$  = besarnya konsumsi yang tidak dipengaruhi pendapatan

$b$  = hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi

$Y$  = pendapatan disposable (pendapatan yang siap dibelanjakan)

## 2. Teori Konsumsi Siklus Hidup (Franco Modigliani)

Teori ini merupakan perluasan dari teori Keynes. Modigliani menekankan bahwa tingkat pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan seseorang dan tabungan dapat menggerakkan pendapatan dari masa hidupnya. Fungsi konsumsi menurut Modigliani adalah sebagai berikut<sup>51</sup> :

$$C = (W + RY) / T$$

Dimana :

$W$  = kekayaan

$Y$  = pendapatan

$T$  = periode lama hidup

$R$  = masa pensiun

## 3. Teori Konsumsi dengan Pendapatan Permanen (Friedman)

Menurut Friedman konsumsi tidak berhubungan dengan pendapatan sekarang tetapi dengan estimasi pendapatan jangka panjang.

---

<sup>51</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008).hlm.38

Friedman mendefinisikan pendapatan permanen sebagai pendapatan jangka panjang rata-rata yang diharapkan akan diterima dari gaji atau upah seseorang pekerja dan pendapatan yang diterima dari harta tetap seperti pendapatan dari pemilik saham, obligasi dan *real estate*. Menurut teori pendapatan permanen tingkat konsumsi seseorang pada suatu waktu tertentu bukan ditentukan oleh pendapatan yang sebenarnya diterima tetapi oleh pendapatan permanen.<sup>52</sup> Pendapatan permanen adalah kestabilan yang akan tetap dijaga sepanjang hidup dimana tingkat kekayaan dan pendapatan yang dibelanjakan sekarang dan kemudian hari tetap.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Derrydan Chenny bertujuan untuk menguji pengaruh lelang sukuk terhadap perekonomian Indonesia dengan metode estimasi *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Hasil penelitian ini menunjukkan SBSN berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di Indonesia<sup>53</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah metode yang digunakan dalam penelitian dan variabel independen yang digunakan. Peneliti disini menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), sedangkan penulis menggunakan

---

<sup>52</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*..hlm.358.

<sup>53</sup>Derry Fahrian dan Chenny Seftarita, "Pengaruh Lelang Sukuk terhadap Perekonomian Indonesia"....hlm.446.

analisis regresi linear berganda. Selain itu penulis menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai variabel independen.

Penelitian yang dilakukan Tya bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh dana investasi melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang Periode 2008-2012 dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* (ECM). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Surat Utang Negara (SUN) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan variabel Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>54</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah metode yang digunakan dalam penelitian dan variabel independen. Peneliti disini menggunakan metode analisis *Error Correction Model* (ECM), sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. Selain itu peneliti menggunakan variabel independen salah satunya adalah Surat Utang Negara (SUN) sedangkan penulis menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Penelitian yang dilakukan Yunie bertujuan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara pembiayaan bank syariah, JII, SBIS, dan jumlah uang beredar terhadap produk domestik bruto dengan

---

<sup>54</sup>Tya Ryandini, "Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) .... hlm.59.

metode analisis model koreksi kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya SBIS yang memiliki pengaruh terhadap PDB. Sedangkan dalam jangka panjang seluruh variabel bebas yaitu pembiayaan bank syariah, JII, SBIS, dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap PDB.<sup>55</sup>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah metode yang digunakan dalam penelitian dan variabel independen yang dipakai. Peneliti disini menggunakan metode analisis *Error Correction Model* (ECM), sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. Selain itu peneliti menggunakan variabel independen salah satunya adalah pembiayaan bank syariah sedangkan penulis menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Penelitian yang dilakukan Wulan dengan tujuan menguji pengaruh instrumen moneter syariah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan metode analisis model kesalahan koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBIS jangka pendek memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya total pembiayaan dan kontribusi ekspor tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, total pembiayaan, SBIS, dan kontribusi ekspor berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan PDB di Indonesia.<sup>56</sup>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah metode yang digunakan dalam penelitian dan variabel

---

<sup>55</sup>Yunie Fitriani, et.all "Keterkaitan Indikator Moneter Syariah terhadap Pendapatan Domestik Bruto"...hlm.45.

<sup>56</sup>Wulan Asnuri, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia"..... .hlm.279.

independen. Peneliti disini menggunakan metode analisis *Error Correction Model* (ECM), sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. Selain itu peneliti menggunakan variabel dependen salah satunya adalah ekspor sedangkan penulis menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Penelitian yang dilakukan Muhammad dengan tujuan untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001 - 2010 dengan menggunakan metode analisis model kesalahan koreksi (*Error Correction Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan PDB di Indonesia.<sup>57</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan dan variabel independen. Peneliti disini menggunakan metode analisis *Error Correction Model* (ECM), sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. Selain itu peneliti menggunakan variabel dependen investasi dan pengeluaran pemerintah, sedangkan penulis menggunakan variabel independen sertifikat Bank Indonesia syariah dan surat berharga syariah negara.

---

<sup>57</sup>Muhammad Rofiq, "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001-2010"...hlm.55.

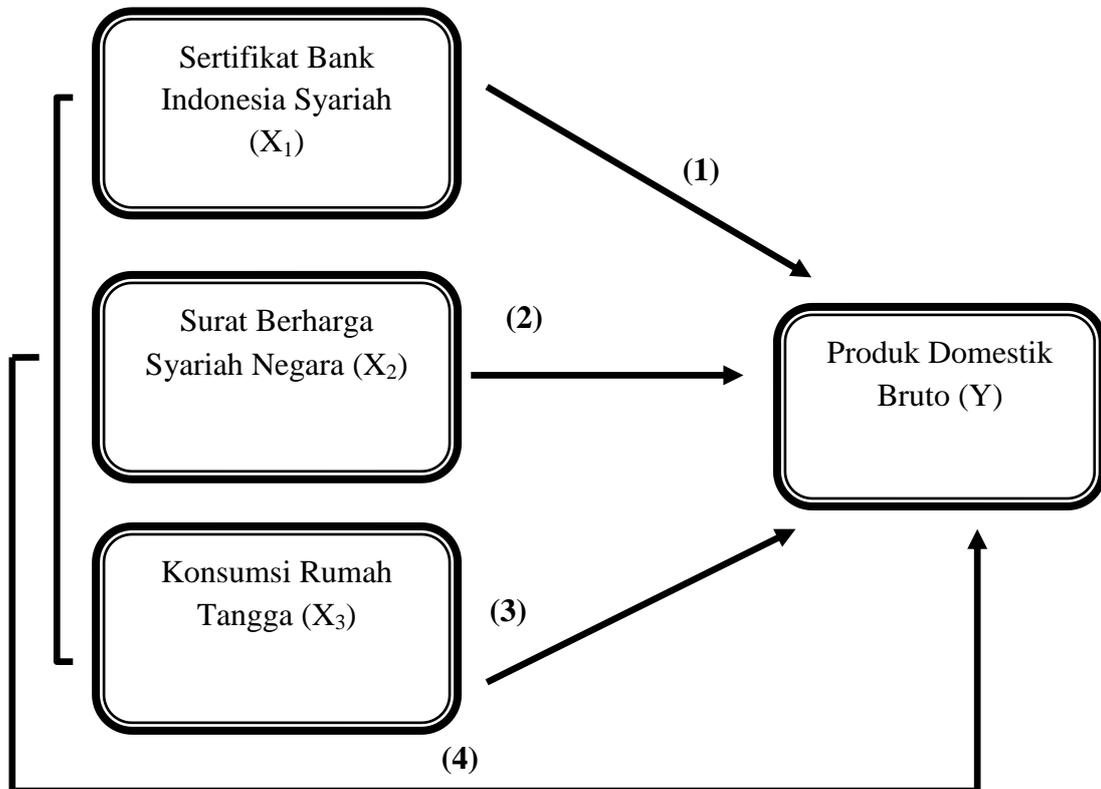
Penelitian yang dilakukan Dyta dengan tujuan menganalisis pengaruh tingkat konsumsi, investasi dan kredit perbankan dalam jangka pendek maupun panjang terhadap pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia dengan metode analisis model kesalahan koreksi (*Error Correction Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel konsumsi dan kredit perbankan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan positif terhadap PDB. Sedangkan investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap PDB di Indonesia<sup>58</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan dan variabel independen. Peneliti disini menggunakan metode analisis *Error Correction Model* (ECM), sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. Selain itu peneliti menggunakan variabel dependen investasi dan kredit perbankan, sedangkan penulis menggunakan variabel independen sertifikat Bank Indonesia syariah dan surat berharga syariah negara.

---

<sup>58</sup>Dyta Herdiana, "Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia....hlm.84

## F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*,  
(Bandung : Alfabeta, 2015)

Keterangan :

1. Pengaruh sertifikat Bank Indonesia syariah (X<sub>1</sub>) terhadap produk domestik bruto (Y) dikembangkan dari teori Nopirin,<sup>59</sup> serta tinjauan penelitian terdahulu Yunie<sup>60</sup> dan Wulan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Nopirin, *Ekonomi Moneter*, .. .hlm.45.

<sup>60</sup>Yunie Fitriani et.al, "Keterkaitan Indikator Moneter Syariah terhadap Pendapatan Domestik Bruto"...hlm.50

<sup>61</sup>Wulan Asnuri, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi....hlm.279

2. Pengaruh surat berharga syariah negara ( $X_2$ ) terhadap produk domestik bruto (Y) dikembangkan dari teori Eri,<sup>62</sup> serta tinjauan penelitian terdahulu Derry<sup>63</sup> dan Tya.<sup>64</sup>
3. Pengaruh konsumsi rumah tangga ( $X_3$ ) terhadap produk domestik bruto (Y) dikembangkan dari teori Tony,<sup>65</sup> serta tinjauan penelitian terdahulu Muhammad<sup>66</sup> dan Dyta.<sup>67</sup>
4. Pengaruh sertifikat Bank Indonesia syariah, surat berharga syariah negara dan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto secara simultan dikembangkan dari teori Case dan Ray,<sup>68</sup> serta tinjauan penelitian terdahulu Muhammad.<sup>69</sup>

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan, atau praktik.<sup>70</sup> Dari uraian gambar kerangka pemikiran di atas, serta mengacu pada

---

<sup>62</sup>Eri Hariyanto, *Mengenal Sukuk Negara* ...hlm.10.

<sup>63</sup>Derry Fahrian dan Chenny Seftarita, "Pengaruh Lelang Sukuk terhadap Perekonomian Indonesia"... hlm.453

<sup>64</sup>Tya Ryandini, "Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara.... .hlm.59

<sup>65</sup>Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, ..hlm.250.

<sup>66</sup>Muhammad Rofiq, "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001-2010"...hlm.54

<sup>67</sup>Dyta Herdiana, "Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia....hlm.84

<sup>68</sup>Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro,..*).hlm.27.

<sup>69</sup>Muhammad Rofiq, "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001-2010"...hlm.54

<sup>70</sup>Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta : Media Kom, 2002), hlm. 9.

latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Sertifikat Bank Indonesia syariah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia.
2. Surat berharga syariah negara berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia.
3. Konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia.
4. Sertifikat Bank Indonesia syariah, surat berharga syariah negara, dan konsumsi rumah tangga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia.